



RSUD WONOSARI
Cepat, Bersih, Simpatik



**AKREDITASI KARS
PARIPURNA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. TAMAN BHAKTI DE WONOSARI GUNUNGKIDUL KODE POS 55812
TELP. (0274) 391 007, 391 288, FAX/MLL (0274) 393 437

POBEL : rsudwonosari06@gmail.com, laman : www.rsud-wonosari.gunungkidulkab.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Kesehatan dan Renstra Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja RSUD Wonosari yang telah dicantumkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja RSUD Wonosari tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) Indikator Kinerja dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Sedangkan untuk indikator kinerja program, dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program RSUD Wonosari tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) Indikator Kinerja dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian indikator Kinerja RSUD Wonosari merupakan hasil dari penerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program RSUD Wonosari pada tahun 2022.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Mempertahankan status akreditasi paripurna dengan melaksanakan seluruh standar akreditasi dalam keseharian dalam mendukung pelayanan kepada pasien;
2. Pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam pengembangan pelayanan;
3. Mengupayakan tersedianya anggaran yang bersumber dari luar pendapatan BLUD untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya besar
4. Terus berupaya meningkatkan komitmen dan seluruh civitas hospitalia RSUD Wonosari untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya.
5. Terus selalu mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan, agar dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus.



Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berdasarkan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021-2026	11
B. Rencana Kinerja 2022	13
C. Perjanjian Kinerja 2022	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	18
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
D. Realisasi Anggaran	42
BAB IV : PENUTUP	44
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Tenaga Akhir Tahun 2022	5
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja	12
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Program	13
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan	14
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022	15
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022	18
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat (Hasil Penilaian Akreditasi)	19
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM)	24
Tabel 3.5	Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Nilai IKM	24
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat	41
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat	42
Tabel 3.8	Tabel Realisasi Belanja RSUD Wonosari Tahun 2022	43
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagaan Akhir Tahun 2022	4
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2022	5
Gambar 3.1	Kegiatan Bimbingan Akreditasi RS Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit	20
Gambar 3.2	Kegiatan Bimbingan Akreditasi RS Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit	22
Gambar 3.3	Penyerahan Sertifikat Akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit	23
Gambar 3.4	Nilai IKM RSUD Wonosari Tahun 2013 – 2022	25
Gambar 3.5	Ruang High Care Unit	27
Gambar 3.6	Beberapa Alat Kesehatan Pengadaan Tahun 2022	29
Gambar 3.7	Kegiatan Promosi dan Edukasi Kesehatan Tahun 2022	31
Gambar 3.8	Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2022	32
Gambar 3.9	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Gunungkidul	34
Gambar 3.10	Penghargaan TOP BUMD Awards 2022	35
Gambar 3.11	Penghargaan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) Terbaik Tahun 2022 dari BPJS Kesehatan	36
Gambar 3.12	Pelatihan Komunikasi Efektif Tahun 2022	37
Gambar 3.13	Kegiatan-Kegiatan Sosial Masyarakat RSUD Wonosari Tahun 2022	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good



governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Beritik tolak dari Renstra Dinas Kesehatan dan Renstra Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2022, maka LKJP RSUD Wonosari yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2022 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Direktur RSUD Wonosari kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

RSUD Wonosari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022. Adapun Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan.

1. Tugas Pokok

Dasar hukum pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 149 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan dengan tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;



- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- f. pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Struktur Organisasi

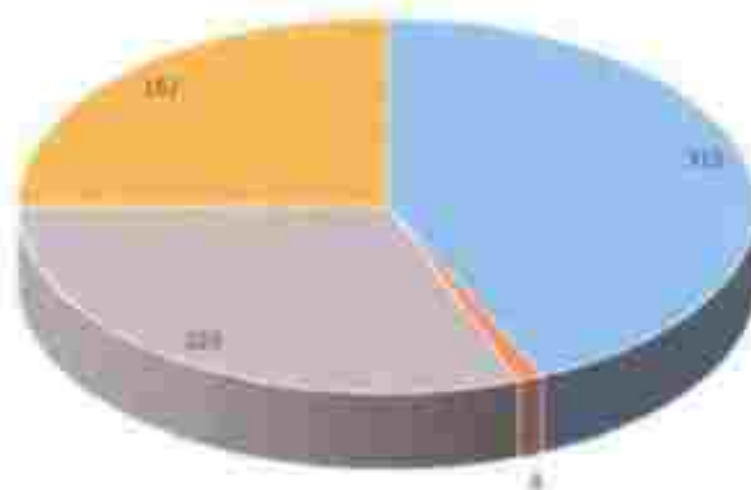
Struktur Organisasi RSUD Wonosari yaitu:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawain;
 - 3) Sub Bagian Data dan Rekam medis
- c. Bidang Perencanaan dan Keuangan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan
- e. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 726 orang pada akhir Tahun 2022 yang terdiri dari 313 PNS, 8 PPPK, 223 TKK dan 182 Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun jabatan struktural di lingkungan RSUD Wonosari sebanyak 14 jabatan, terdiri dari eselon eselon III = 5 jabatan dan eselon IV = 9 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 299 orang.



Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagaan Akhir Tahun 2022



1. PNS = 313 2. PNS = 167 3. TKK = 4 4. TNK

Sumber : Subbagian Kepegawaian RSUD Wonosari

Dari Grafik di atas bisa dilihat bahwa jumlah Tenaga Non PNS lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS. Dari tahun ke tahun jumlah PNS makin menurun dan tidak diimbangi dengan pengadaan PNS baru sehingga hal ini diatasi dengan pengadaan pegawai Non PNS untuk memenuhi kebutuhan SDM yang dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pengembangan layanan rumah sakit.

Sedangkan komposisi pegawai PNS RSUD Wonosari berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

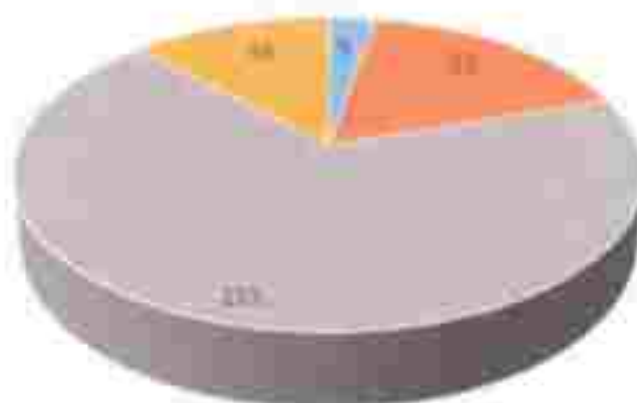
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2022
1	I/a - I/d	9
2	II/a - II/d	53
3	III/a - III/d	213
4	IV/a - IV/e	38
	Jumlah	313

Sumber : Subbagian Kepegawaian RSUD Wonosari



Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2022



+ Golongan IVb = 18 + Golongan IVa = 12
+ Golongan IIIa = 208 + Golongan IIIb = 17

Sumber : Subbagian Kepegawaian RSUD Wonosari

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa jumlah terbesar karyawan PNS adalah pada Golongan/Ruang III/a sampai dengan III/d.

Berikut adalah tabel rincian tenaga berdasarkan jenis tenaga.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Tenaga Akhir Tahun 2022

NO	JENIS TENAGA	KEADAAN				JUMLAH
		PNS	PPPK	TKK	THL	
1	Dokter Umum	9	0	3		12
2	Dokter Spesialis	22	0	8		30
3	Dokter Gigi	1	0	0		1
4	Psikolog Klinis	1	0	0		1
5	Perawat	139	5	55	2	234
6	Perawat Gigi	0	0	2		2
7	Bidan	20	0	18	1	39
8	Apoteker	3	0	6		9
9	Teknis Kefarmasian	4	2	7		13
10	Tenaga Gizi	6	1	3	1	11
11	Sanitarian	1	0	2		3
12	Perekam Medis	5	0	12		17



13	Analisis Kesehatan	13	0	3		16
14	Radiografer	5	0	3		8
15	Teknik Elektromedik	1	0	2		3
16	Keterampilan Fisik	3	0	0		3
17	Penata Anestesi	0	0	4		4
18	Teknisi Transfusi Darah	0	0	2		2
19	Okupasi Terapi	0	0	1		1
20	Asiparis	0	0	2		2
21	Pranata Komputer	0	0	8		8
22	Tenaga Non Kesehatan Non Fungsional	78	0	51	178	307
23	Dokter Tugas Belajar	2				2
Jumlah		313	8	223	182	726

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh RSUD Wonosari pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan dengan mempertahankan status Akreditasi Rumah Sakit Paripurna bintang lima

Akreditasi paripurna yang sudah diraih oleh RSUD Wonosari menuntut tanggungjawab akan pelayanan kesehatan yang sesuai standar keselamatan pasien. Akreditasi rumah sakit diberikan pemerintah melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang ditentukan dan upaya untuk melindungi pasien melalui pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur, mulai dari sumber daya manusia, administrasi dan komunikasi, peralatan medis, hingga fasilitas penunjang lainnya. Tantangan bagi RSUD Wonosari saat ini adalah tetap mempertahankan akreditasi paripurna yang telah diraih untuk ketiga kalinya di Tahun 2022 ini dalam Survei Akreditasi versi StarKes yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Oktober 2022, sehingga penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur mutlak tetap harus dipertahankan bahkan selalu ditingkatkan.

2. Kebijakan pemerintah mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) yang dilaksanakan oleh BPJS



Kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem *Universal Health Coverage* (UHC) melalui SJKN ini memberikan peluang bagi peningkatan dan pengembangan pelayanan di RSUD Wonosari. Kebijakan ini membenarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan. Sistem rujukan berjenjang yang diterapkan saat ini di samping memberikan peluang juga merupakan tantangan bagi RSUD Wonosari. Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Gunungkidul, dan mayoritas pelanggannya adalah pemegang jaminan kesehatan/BPJS, RSUD Wonosari harus mampu memfasilitasi masyarakat sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan. Pada tahun 2022 ini, klaim ke BPJS relatif lancar dan hampir tidak mempengaruhi *cashflow* RSUD Wonosari.

3. Kunjungan Pasien RSUD Wonosari

Meningkatnya jumlah kunjungan pasien sangat mempengaruhi kinerja pelayanan di RSUD Wonosari. Meningkatnya jumlah pengunjung juga diiringi dengan semakin beragamnya kebutuhan pelanggan/masyarakat akan jenis-jenis layanan kesehatan sehingga terjadi peningkatan dan penambahan sarana prasarana serta alat kesehatan penunjang pelayanan. Di Tahun 2022, angka kunjungan RSUD Wonosari mulai menggeliat naik seiring dengan semakin menurunnya kasus covid-19.

4. Pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD

Pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD memberikan keuntungan bagi RSUD Wonosari karena lebih fleksibel dalam mengelola anggaran keuangannya. Hal ini memberikan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas maupun kegiatan yang mendukung program pemerintah. Namun demikian, dengan adanya perubahan status RSUD Wonosari menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan di tahun 2022 ini masih menjadi penyebab timbulnya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Apalagi RSUD Wonosari memerlukan kecepatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.



5. Keterbatasan anggaran

Ketersediaan dana sangat berpengaruh terhadap ketersediaan layanan dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Sebagai BLUD, RSUD Wonosari memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangannya sendiri. Belanja RSUD Wonosari disesuaikan dengan pendapatannya, untuk tahun 2022 RSUD Wonosari hanya mendapatkan APBD kabupaten dengan jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhannya.

Selama ini anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk pembelanjaan rutin sehingga RSUD Wonosari mengalami kesulitan untuk pembelanjaan atau pengadaan sarana prasarana yang bernilai besar. Untuk belanja gedung dan peralatan kesehatan RSUD Wonosari masih sangat bergantung dari Dana Alokasi Khusus. Namun di tahun 2022 RSUD Wonosari tidak mendapatkan alokasi DAK. Pada tahun 2022, meskipun tidak memperoleh alokasi dari DAK, RSUD Wonosari memperoleh alokasi dana Bantuan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (Banper FEN) untuk pembelian alat urologi ESWL dan UPS.

6. Keterbatasan sarana prasarana dan peralatan

Keterbatasan sarana prasarana dan peralatan kesehatan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran belanja. Ketersediaan sarana prasarana maupun peralatan kesehatan merupakan daya dukung bagi pelayanan kesehatan. Keterbatasan inilah yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih mendapatkan pelayanan di rumah sakit lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun harus menempuh jarak yang lebih jauh. Meskipun sebenarnya, hampir setiap tahun RSUD Wonosari selalu menambah peralatan kesehatan yang sebelumnya belum tersedia.

Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan mencanangkan Transformasi layanan rujukan Indonesia dimana Penyakit Jantung, kanker, stroke, dan Gagal Ginjal menjadi penyebab kematian tertinggi dan berbiaya mahal. RSUD Wonosari ditetapkan oleh kementerian kesehatan



sebagai Rumah Sakit Madya di DIY dalam rujukan kasus-kasus tersebut. Namun, untuk menjadi Rumah Sakit Madya tersebut RSUD Wonosari dituntut memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan kasus-kasus diatas. Kemenkes dimungkinkan untuk memberikan bantuan pemenuhan peralatan, namun tidak untuk gedungnya. DED gedung yang dipertukan sudah tersedia, masih diupayakan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut ke APBD DIY mengingat membutuhkan anggaran yang cukup besar dan RSUD Wonosari tidak bisa mengandalkan anggaran BLUD

7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat

Perkembangan teknologi informasi yang pesat secara langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan kesadaran masyarakat. Hal ini harus disikapi oleh RSUD Wonosari dengan menyediakan pelayanan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Meski demikian, hal ini juga dimanfaatkan oleh RSUD Wonosari dalam memudahkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Misalnya saja pada akhir tahun 2019 RSUD Wonosari menerapkan pendaftaran via WA untuk memudahkan masyarakat sampai ke pelosok untuk mendapatkan akses layanan tanpa harus datang dihari hanya untuk memperoleh nomor antrian, Antrian via M/JKN, dan di tahun 2022 mulai disiapkan e Rekam Medis.

8. Berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul

Selama beberapa tahun terakhir ini, sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul berkembang sangat pesat. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan maupun peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung keadaan ini juga mempengaruhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. RSUD Wonosari merespon peluang ini dengan senantiasa meningkatkan pelayanan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

9. Banyaknya rumah sakit swasta yang beroperasi

Berkembangnya wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai akibat dari perkembangan pariwisata, maupun perkembangan wilayah perkotaannya



mendorong berdampak pada perkembangan tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran terhadap kesehatan. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diinginkannya, dan hal ini mendorong banyak rumah sakit swasta yang beroperasi dengan berbagai strategi pelayanan yang dinilai lebih baik dibandingkan RSUD Wonosari

10. Keterbatasan lahan

Semakin berkembangnya pelayanan di RSUD Wonosari akan berdampak pada pengembangan sarana prasarana rumah sakit. Untuk itu dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk pengembangannya. Sementara itu, RSUD Wonosari masih kekurangan lahan untuk pengembangan pelayanan. Masih banyak sarana prasarana seperti gedung dan instalasi yang perlu didirikan namun belum terealisasi karena keterbatasan lahan maupun anggaran. Hal ini berdampak pada penyediaan pelayanan yang belum sesuai dengan standar.

11. Pandemi Covid-19

Kasus covid-19 mulai menurun secara signifikan. Angka kunjungan pasien mulai naik kembali seperti sebelum covid. Beberapa anggaran yang disediakan terkait penanganan covid-19 minimal dalam penggunaannya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis RSUD Wonosari sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Bisnis RSUD Wonosari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana strategis Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja RSUD Wonosari dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan RSUD Wonosari Tahun 2021-2026 tidak bisa lepas dari tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan (Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat) adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.

Selanjutnya RSUD Wonosari menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat	Hasil Penilaian Akreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat



RSUD Wonosari telah menetapkan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis yang diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat	Hasil Penilaian Akreditasi	<p>Akreditasi Rumah Sakit adalah Pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh pemerintah, dimana mulai tahun 2022 dilakukan survey 4 tahun sekali, dan survey verifikasi setiap tahun.</p> <p>Penghargaan status akreditasi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak Lulus Akreditasi2. Akreditasi Tingkat Dasar3. Akreditasi Tingkat Madya4. Akreditasi Tingkat Utama5. Akreditasi Tingkat Paripurna <p>Yang dimaksud sebagai indikator kinerja disini adalah hasil penilaian akreditasi Tingkat Paripurna</p>
		Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</p>
			<p>Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot dibagi jumlah unsur} = 1 \text{ dibagi } 14 = 0,071$</p>
			<p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan: $\times 25$</p> <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>



2. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat dengan melaksanakan program prioritas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1.	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat (Dinkes) Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat (RSUD Wonosari)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pemerintahan daerah kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)	Rumus: $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan tertaksana}}{\sum \text{Seluruh kegiatan dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna	Rumus: $\frac{\sum \text{Faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna}}{\sum \text{Seluruh Faskes}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

B. RENCANA KINERJA 2022

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.



Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, Dinas Kesehatan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

RSUD Wonosari dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sebagaimana teruraikan dalam Renstra Bisnis RSUD Wonosari memiliki target kinerja pada tingkat sasaran yang juga akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut dan akan mendukung pencapaian tujuan dinas kesehatan.

Target sasaran untuk Tahun 2022 merupakan target tahun pertama dari Renstra Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021-2026 dan

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Wonosari Tahun 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat	Hasil Penilaian Akreditasi	-	Paripurna
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,4

C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Direktur RSUD Wonosari dengan Bupati Gunungkidul untuk



mewujudkan target kinerja tahun pertama dari Renstra Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Wonosari. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai RSUD Wonosari selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022. Perubahan Perjanjian Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja RSUD Wonosari
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	persen	100

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.316.800.000,00	Dana BLUD
		Rp. 6.605.517.000,00	Dana Banper-PEN
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 100.026.250,00	Dana DBHCHT
		Rp. 3.758.237.000,00	Dana APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dan pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
68% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-Rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat



rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Pengukuran target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja RSUD Wonosari tahun 2022. Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian erd 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat	Hasil Penilaian Akreditasi	Papuma	Papuma	Papuma	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,10	83,40	83,58	100,22	83,70	99,88

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

	<p>Sasaran "Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat"</p>
--	---

Di era globalisasi ini, rumah sakit perlu untuk terus meningkatkan layanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan.



Peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang tidak pernah berhenti dan harus selalu dilakukan oleh rumah sakit. Dalam rangka mewujudkan rumah sakit yang berdaya saing, maka peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi hal utama yang harus dilakukan rumah sakit secara berkesinambungan.

Sasaran ini diambil dalam rangka mencapai tujuan RSUD Wonosari dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integratif memantau dan menilai mutu pelayanan RSUD Wonosari, memecahkan masalah-masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya, sehingga mutu akan menjadi lebih baik.

Pencapaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat
(Hasil Penilaian Akreditasi)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Rencana (2027)	Capaian s/d 2022 terhadap 2027 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Hasil Penilaian Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Tinggi	100	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100	Sangat Tinggi	100	100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% yang masuk kategori **sangat tinggi**.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi Rumah Sakit tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.

Tujuan pengaturan akreditasi rumah sakit adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit, dan rumah sakit sebagai institusi mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata internasional.



Pada Tahun 2022 ini, RSUD Wonosari kembali berjuang untuk mempertahankan status Akreditasi Paripurna, yang telah disandang sejak tahun 2016.

Dalam rangka mempersiapkan survey akreditasi Tahun 2022, maka RSUD Wonosari mengadakan Bimbingan Akreditasi Rumah Sakit. Bimbingan ini dilaksanakan dalam 3 hari pada tanggal 6-8 Juni 2022 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dengan dilaksanakannya kegiatan bimbingan akreditasi ini, diharapkan seluruh tim akreditasi RSUD Wonosari dapat lebih meningkatkan kesiapan untuk menghadapi akreditasi yang sesungguhnya.

Gambar 3.1

**Kegiatan Bimbingan Akreditasi RS Standar Akreditasi Rumah Sakit
Kemenkes RI Tahun 2022 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.**





Selanjutnya, RSUD Wonosari telah melaksanakan Survei Akreditasi Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada hari Rabu (26/10/22) sampai dengan hari Jumat (28/10/22). Sesuai dengan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Rumah Sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Survei akreditasi RSUD Wonosari dilakukan oleh Tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang terdiri dari 2 orang surveior yaitu dr. Regowo, M.Kes, FISQua dan Purwo Atmanto, S.Kep.Ns, MPH.

Terdapat 16 bab standar penilaian yang dilaksanakan saat akreditasi rumah sakit diantaranya Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MIRK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK), Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), Komunikasi dan Edukasi (KE), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), serta Program Nasional (KIA, HIV/AIDS, TB, Gizi, dan PKBRIS).

Pelaksanaan Survei Akreditasi dilaksanakan dengan metode *hybrid*, yaitu secara daring dan luring. Survei daring dilaksanakan pada hari pertama yaitu Rabu (26/10/22) untuk menilai kelengkapan dokumen yang telah diupload



melalui aplikasi yang digunakan KARS yaitu SIDOKAR. Kemudian, dilanjutkan survei secara luring pada hari Kamis (27/10/22) dan Jumat (28/10/22) untuk menilai pelaksanaan atau implementasi dan standar akreditasi di lapangan secara langsung.

Gambar 3.2

Kegiatan Survei Akreditasi RS Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI Tahun 2022 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.





Gambar 3.3
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi
Rumah Sakit





Survei terakhir memberikan hasil yang memuaskan bagi seluruh civitas hospitalia RSUD Wonosari. Status Akreditasi Paripurna berhasil dipertahankan ketiga kalinya. Meskipun dengan instrumen dan aturan yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, RSUD Wonosari tetap bisa mempertahankan. Semoga hal ini semakin bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan RSUD Wonosari dan menjadikannya sebagai rumah sakit pilihan utama masyarakat gunungkidul pada khususnya.

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat
(Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2022 terhadap 2027 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	82,10	83,4	83,16	100,22	Sangat tinggi	83,70	99,66
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,22	Sangat tinggi	83,70	99,66

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,22% yang masuk kategori **sangat tinggi**.

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur setiap 6 bulan sekali dalam bentuk Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk menilai mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan melalui IKM, dilakukan dengan kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 3.5
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Nilai IKM

Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM yang cenderung mengalami kenaikan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan RSUD Wonosari dinilai semakin baik oleh



masyarakat/pelanggan. Berikut ini capaian nilai IKM RSUD Wonosari tahun 2013-2022:

Gambar 3.4
Nilai IKM RSUD Wonosari Tahun 2013-2022



Sumber : Sub Bagian Umum RSUD Wonosari, 2022

Dari grafik tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa nilai IKM cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak dimulainya survei tahun 2013, nilai IKM mengalami fluktuasi hingga tahun 2015 kinerja RSUD Wonosari berada pada kategori **Kurang Baik**. Namun setelahnya, RSUD Wonosari mampu untuk mempertahankan mutu dan kualitas pelayanan selalu berada dalam kategori **Baik**.

Akan tetapi pada tahun 2021 nilai IKM yang diperoleh mengalami penurunan dan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan puncak pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2021 mengharuskan RSUD Wonosari menerapkan protokol khusus dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan seperti situasi normal. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pelanggan, pasien, dan civitas hospitala RSUD Wonosari dari penyebaran virus covid-19, sembari tetap memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Sehingga dalam proses transisi ini, pelanggan merasa kurang



nyaman karena harus ikut beradaptasi dengan pelayanan kesehatan di era pandemi covid-19.

Meskipun tahun 2022 masih terpengaruh oleh pandemi covid-19, pelanggan/ masyarakat merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai IKM tahun 2022 yang berada dalam kategori BAIK bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan bisa lebih baik dari tahun 2020. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen terhadap masyarakat pengguna jasa layanan RSUD Wonosari, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publiknya dan meningkatkan kepuasan masyarakat antara lain :

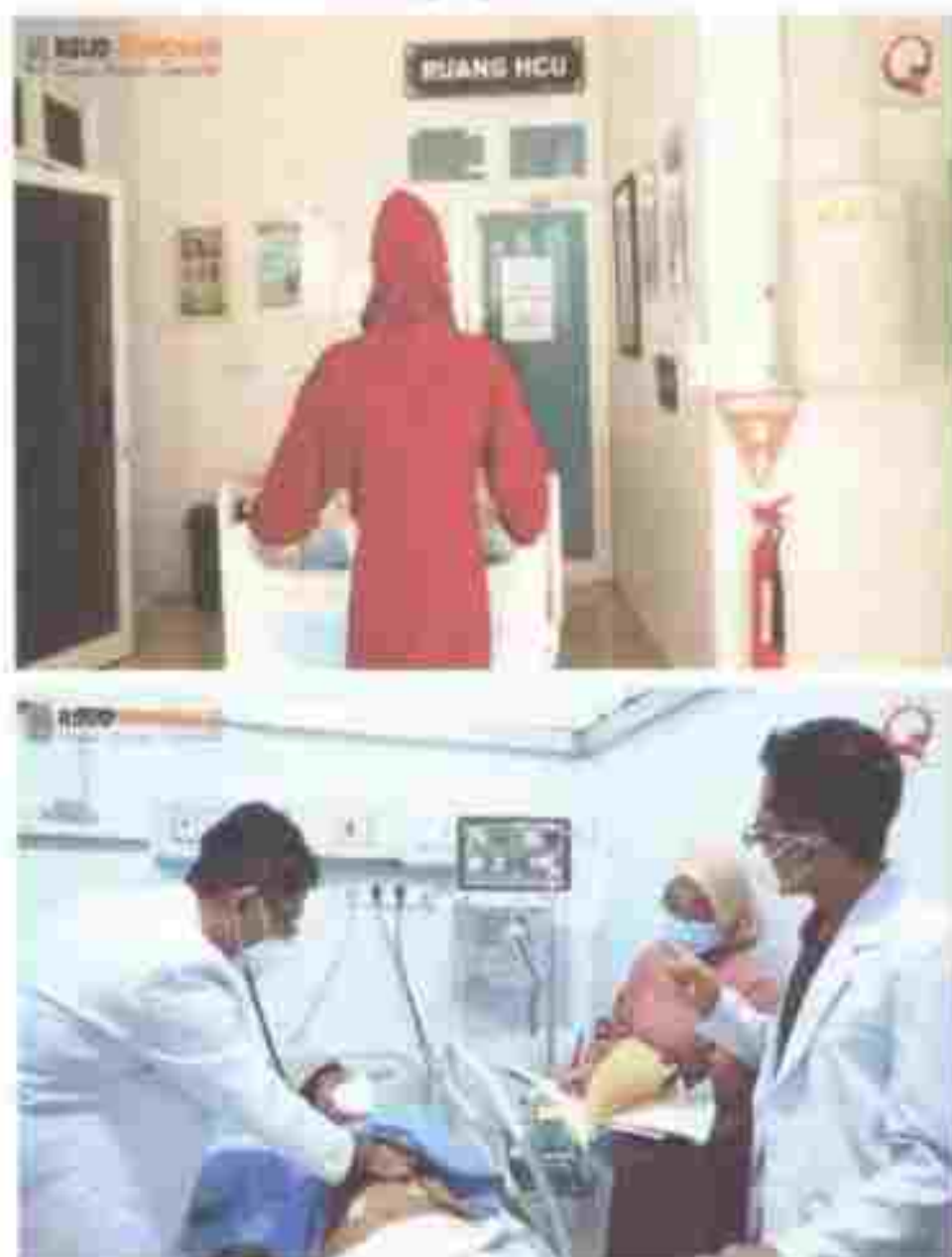
1) Melaksanakan akreditasi rumah sakit.

Sejak tahun 2016 RSUD Wonosari mengikuti akreditasi rumah sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan sesuai standar. Tahun 2016 RSUD Wonosari meraih predikat akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dan tahun 2019 pada survei ulang kembali meraih predikat akreditasi paripurna. Dan pada tahun 2022 kembali akreditasi paripurna tetap bisa dipertahankan. Diraihnya predikat akreditasi paripurna untuk ketiga kalinya menandakan bahwa pelayanan di RSUD Wonosari telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan sehingga tingkat kepuasan pelanggan juga meningkat.

2) Pengembangan layanan di RSUD Wonosari untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pelanggan/masyarakat.

Kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadikan RSUD Wonosari terus melakukan pengembangan layanan. Pengembangan layanan ini berupa penambahan jenis layanan baru, serta penambahan fasilitas seperti sarana, prasarana maupun peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan. Pada tahun 2022 pengembangan layanan yang dilakukan RSUD Wonosari salah satunya adalah Pembukaan HCU (*High Care Unit*)

Gambar 3.5
Ruang High Care Unit



High Care Unit (HCU) adalah unit pelayanan rawat inap bagi pasien dengan kondisi stabil dari fungsi respirasi, hemodinamik dan kesadaran, namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat. Dengan kata lain, layanan perawatan HCU merupakan unit perawatan bagi pasien dengan kondisi stabil dan sadar, tetapi memerlukan perawatan dan pengobatan secara ketat.



Ruang layanan perawatan HCU berada di gedung IGD lantai 2. Dengan kapasitas 5 tempat tidur yang menggunakan bed elektrik serta bed side monitor di setiap tempat tidur, tersedia alat medis lainnya seperti infuse pump, syringe pump, alat suction dan unit resusitasi dan alat emergency serta alat penunjang medis lainnya.

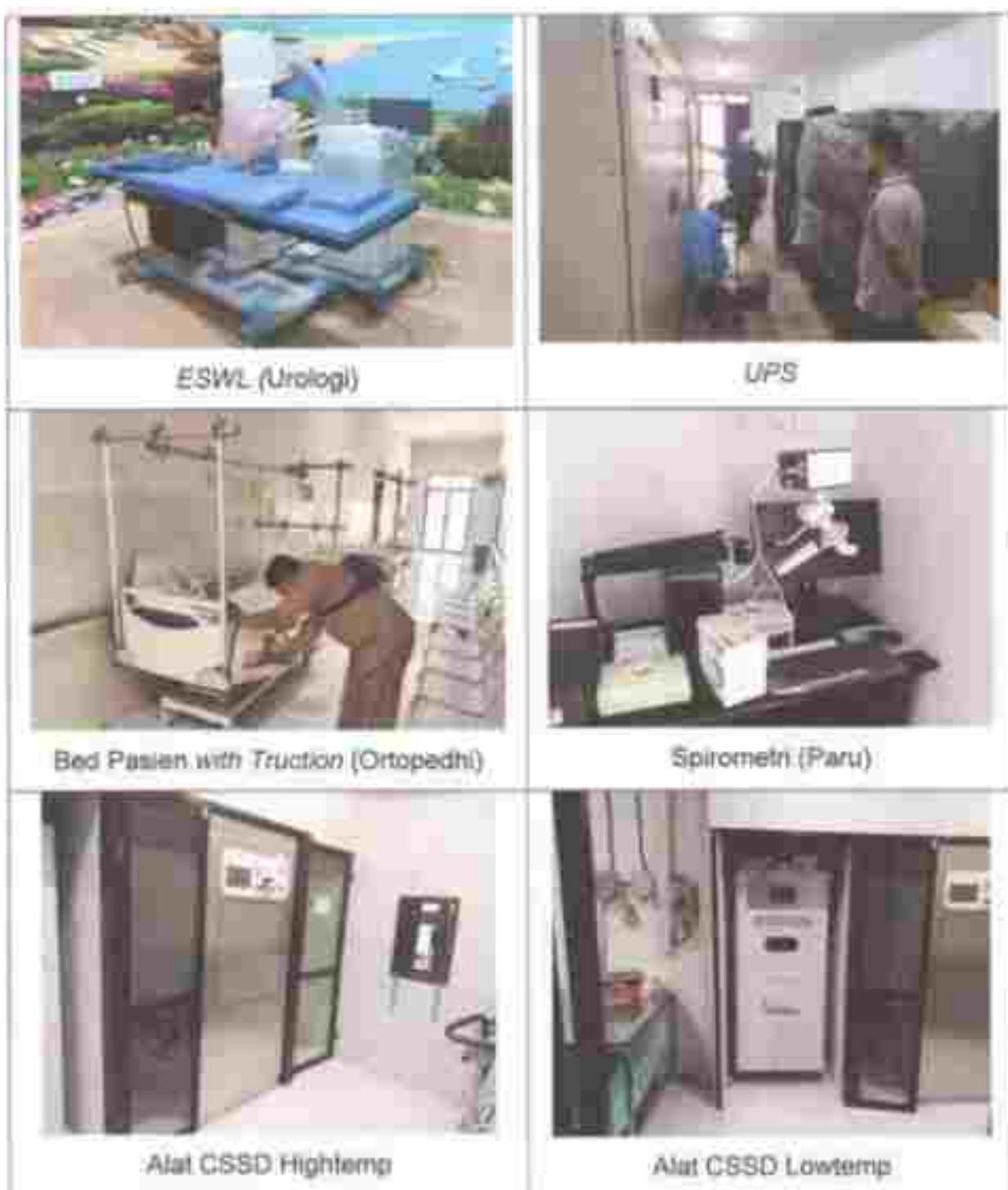
Bupati Gunungkidul secara langsung meresmikan dibukanya layanan Perawatan High Care Unit (HCU) RSUD Wonosari pada acara Puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58, yang digelar di Ruang Teater Taman Budaya Gunungkidul, pada hari Rabu 16 November 2022.

Pada tahun 2022, pemenuhan alat kesehatan di RSUD Wonosari bisa dibilang sangat banyak. Pemenuhan alat kesehatan ini bersumber murni dari dana BLUD dan sekitar 6,5 Milyar dari dana Bantuan Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (Banper-PEN). Khusus untuk Banper-PEN, merupakan anggaran dari kementerian kesehatan yang dialokasikan di pertengahan tahun 2022 untuk pengadaan alat kesehatan yang mendukung program prioritas jejaring rujukan kasus-kasus Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi. RSUD Wonosari ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan madya untuk kasus-kasus tersebut di DIY. Untuk tahun 2022, dana tersebut digunakan untuk pembelian alat ESWL dan UPS. Untuk Dana BLUD, RSUD Wonosari menggunakan SILPA 2021 untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan, namun tidak mendapatkan alokasi anggaran dari luar dan bahkan sulit mendapatkan anggaran baik dari propinsi maupun pusat.

Berikut gambar beberapa alat dimaksud:



Gambar 3.6
Beberapa Alat Kesehatan Pengadaan Tahun 2022





Ophthalmoscope (Mata)



Endoscopy THT

Alat-alat tersebut diadakan untuk menunjang pelayanan di RSUD Wonosari. Melalui pengadaan alat kesehatan yang memenuhi standar, diharapkan semakin menunjang mutu pelayanan di RSUD Wonosari. Alat yang semula tidak ada menjadi ada, alat yang sudah tua diganti dengan yang baru merupakan upaya RSUD Wonosari untuk semakin meningkatkan mutu layanannya. Pasien yang semula harus ke Jogja untuk bisa mendapatkan pelayanan, dengan pengadaan alat-alat baru tersebut diharapkan masyarakat Gunungkidul tidak lagi harus ke Jogja untuk bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

3) Kegiatan Promosi dan Edukasi Kesehatan.

Salah satu upaya RSUD Wonosari untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melakukan kegiatan promosi dan edukasi kesehatan di rumah sakit. Sasarannya adalah pasien, keluarga pasien, masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit, seluruh karyawan RSUD Wonosari, maupun masyarakat di sekitar rumah sakit. Promosi dan edukasi kesehatan dilakukan melalui berbagai media, di antaranya leaflet, videotron, televisi di ruang tunggu, maupun secara lisan melalui penyuluhan langsung kepada pasien dan keluarganya. RSUD Wonosari juga rutin mengadakan talkshow kesehatan yang ditayangkan melalui channel YouTube RSUD Wonosari, dan melalui siaran radio di Radio Swara Dhaksinarga.

Gambar 3.7
Kegiatan Promosi dan Edukasi Kesehatan Tahun 2022



4) Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Sebagai penyedia jasa layanan kesehatan, RSUD Wonosari berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Transformasi digital menjadi komitmen RSUD Wonosari dalam menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan nyaman kepada masyarakat. Penggunaan Teknologi telah menjadi sebuah keharusan, terlebih ditengah pandemi covid-19. Sehingga diperlukan kemudahan akses layanan kesehatan, efisiensi layanan, dan integrasi data sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Mengawal proses transformasi digital, RSUD Wonosari berhasil mendapatkan dua penghargaan TOP DIGITAL AWARDS, pada Kamis 15 Desember 2022. TOP DIGITAL AWARDS ini adalah ajang penghargaan tahunan di bidang

Teknologi Informasi terbesar se-Indonesia. Penghargaan yang diterima RSUD Wonosari adalah:

1. TOP DIGITAL Implementation 2022 (SANGAT BAIK) – Bintang 4.
2. TOP Leader on Digital Implementation 2022 kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul H. Sunaryanta

Penghargaan kategori TOP DIGITAL Implementation membuktikan bahwa RSUD Wonosari telah memiliki tata kelola, implementasi, dan infrastruktur pemanfaatan teknologi digital yang Sangat Baik dalam proses pelayanan. Penghargaan TOP DIGITAL AWARDS ini menjadi motivasi RSUD Wonosari untuk terus melakukan perbaikan dan menghadirkan pelayanan optimal berbasis transformasi digital di masa yang akan datang

Gambar 3.8

Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2022



Selain itu, pada tahun 2022, RSUD Wonosari juga memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari BUPATI Kabupaten Gunungkidul dan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan diberikan di Ruang rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Penghargaan tersebut diumumkan dan diserahkan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. RSUD Wonosari dianggap telah memenuhi syarat dalam menyampaikan, menyediakan dan menguasai Informasi Publik berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan ini diraih setelah melalui rangkaian penilaian yang meliputi penilaian website, pengisian SAQ, yistasi Badan Publik, dan Uji Publik.

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.



Gambar 3.9
Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2022



Tidak hanya beberapa penghargaan diatas, RSUD juga terpilih sebagai Finalis ajang TOP BUMD Awards 2022 yang diselenggarakan Majalah Top Business dan i-OTDA.

Pada acara tersebut RSUD Wonosari meraih Penghargaan sebagai Pemenang TOP BUMD 2022 dengan kategori: Direktur RSUD Wonosari, dr. Heru Sulistyowati, Sp.A sebagai TOP CEO BUMD 2022 dan RSUD Wonosari sebagai TOP BUMD 2022 Bintang 4

Penghargaan tersebut patut dan layak disyukuri dan dibanggakan, karena RSUD Wonosari berhasil menjadi Pemenang dari lebih 1.149 BUMD dari seluruh Indonesia dalam event TOP BUMD Awards yang merupakan

penghargaan Award BUMD yang terbesar, serta saling bergengsi dan membanggakan di Indonesia.

Gambar 3.10
Penghargaan TOP BUMD Awards 2022



Pada Hari Selasa, 28 Juni 2022 Direktur RSUD Wonosari dr. Heru Sulistyowati, Sp.A juga menerima Empat penghargaan Bintang tiga dari BPJS Kesehatan kategori Rumah Sakit Dengan Konten Informasi di Media Sosial Terbaik Tahun 2022, Penghargaan Bintang 3 kategori Rumah Sakit dengan Implementasi Program Rujuk Balik Terbaik Tahun 2021, Rumah Sakit Dengan Nilai Kepatuhan Tertinggi Tahun 2021 dan juga PIC JKN FKRTL Terbaik Tahun 2022.

Gambar 3.11

**Penghargaan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) Terbaik
Tahun 2022 dari BPJS Kesehatan**



Dengan diraihnya berbagai penghargaan tersebut diatas membuktikan bahwa RSUD Wonosari selalu berbenah dalam upaya membenikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetap berkomitmen bisa mempertahankan pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang prima dan paripurna.

5) Kinerja petugas di unit-unit pelayanan semakin baik.

Pengaduan masyarakat mengenai kinerja petugas RSUD Wonosari menjadikan semangat untuk terus melakukan perbaikan, di antaranya dengan upaya membenikan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi efektif bagi petugas.

Pada tanggal 1 Oktober 2022 telah dilaksanakan Pelatihan Komunikasi Efektif dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Wonosari, meningkatkan kemampuan petugas dalam membenikan pelayanan yang prima kepada pasien dan merupakan tindak lanjut perbaikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi di Rumah Sakit.

Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2022 dengan narasumber dari Tim Komunikasi Edukasi



Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada yang sudah memiliki sertifikasi *Training of Trainer (TOT)* Komunikasi Efektif. Pelatihan di hari pertama dihadiri oleh 42 peserta dari non PPA (Non Profesional Pemberi Asuhan) atau petugas non kesehatan yang terdiri dari Petugas admisi rawat jalan, admisi rawat inap, admisi IGD, porter, petugas informasi, satpam, pramusaji dan admin ruang perawatan. Sedangkan, di hari kedua dihadiri oleh 30 peserta dari PPA (Profesional Pemberi Asuhan) atau petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan.

Kegiatan komunikasi di Rumah Sakit merupakan kegiatan yang unik dan rumit, karena melibatkan banyak profesi dan multidisiplin ilmu sehingga memiliki potensi kegagalan komunikasi yang tinggi yang akan berdampak pada ketidakpahaman pasien akan informasi dan edukasi yang diberikan, ketidakpuasan terhadap pelayanan, serta yang lebih fatal akan berakibat pada insiden keselamatan pasien, sehingga diperlukan kemampuan petugas untuk melakukan komunikasi secara efektif.

Gambar 3.12
Pelatihan Komunikasi Efektif Tahun 2022





Akreditasi yang dilakukan oleh RSUD Wonosari juga sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas sehingga mereka lebih baik dalam melayani pelanggan, karena hal ini juga termasuk salah satu poin penilaian dalam akreditasi.

6) Melakukan Kegiatan-kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Selain sebagai upaya untuk promosi pelayanan rumah sakit, membantu masyarakat yang kurang mampu, juga untuk semakin mendekatkan rumah sakit pada masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022 di antaranya:

- a. Pemberian Paket Lebaran kepada kaum Dhuafa yang dilakukan rutin setiap tahun;
- b. Bantuan Beasiswa Bulanan bagi anak yatim dan dhuafa yang menjadi anak asuh RSUD Wonosari dengan sumber dana beasiswa berasal dari zakat profesi karyawan/karyawati RSUD Wonosari,
- c. Donor darah rutin 3 bulanan yang pesertanya dari karyawan/karyawati RSUD Wonosari dan masyarakat umum.



Gambar 3.13
Kegiatan-kegiatan Sosial Masyarakat RSUD Wonosari
Tahun 2022



Pembagian Bingkisan dan Beasiswa Anak Asuh RSUD Wonosari



Pembagian bingkisan kepada pasien dalam rangka hari jadi RSUD Wonosari



Kegiatan Gedor Rasulan (Donor darah setiap 3 bulan sekali di RSUD Wonosari)

Agar sasaran selalu tercapai, terdapat alternatif solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh RSUD Wonosari antara lain:

1. Mempertahankan status akreditasi paripurna
2. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan RSUD Wonosari secara rutin. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, RSUD Wonosari melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengambilan data dilakukan setiap bulan dan pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selain pengukuran Indeks kepuasan pelayanan RSUD Wonosari dengan IKM, RSUD Wonosari juga menyediakan sarana penyampaian keluhan pasien/pelanggan yaitu berupa kotak saran di titik-titik strategis seperti di ruang tunggu dan di masing-masing bangsal rawat inap, aplikasi pesan Whatsapp, serta alamat Email. Dengan sarana ini pasien dimudahkan dalam menyampaikan keluhannya.

Pencapaian target Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatkan terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis RSUD Wonosari, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



2. Program Penuharian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatkan:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Program pada
Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatkan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s.d 2022 terhadap 2020 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Program Pemenuhan Utusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan perundang-undangan diarahkan kabupaten/kota (akumulasi capaian kegiatan)	-	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang bersinergi dengan jejaring Paripurna	-	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100,00% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 122.780.581.191,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 116.663.023.257,00 (95,017%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 6.117.557.934,00 (4,983%), yang dirinci dalam tabel berikut:



Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program pada
Sasaran Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.922.127.000,00	112.808.504.595,00	94,85	6.113.622.401,00	5,14
2.	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.854.204.191,00	3.854.518.658,00	99,99	3.745.333,00	0,097
	Jumlah	122.780.581.191,00	116.663.023.257,00	95,017	6.117.557.934,00	4,983

Permasalahan

1. Capaian belanja pada program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memang di bawah 95%. Hal ini bukan berarti secara kualitas tidak tercapai. Kebutuhan operasional rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan pasien telah tercapai. Sehingga bisa dikatakan RSUD Wonosari telah melakukan efisiensi sebesar 5,14%.
2. Pada perencanaan Tahun 2022 masih menggunakan prediksi adanya kasus covid-19, ternyata kasus menurun cukup signifikan sehingga ada beberapa pos anggaran yang terkait covid-19 tidak terpakai.

Solusi

1. RSUD Wonosari harus terus berusaha mengupayakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Yang paling penting adalah kualitas layanan tetap terjaga sesuai standar dengan penggunaan anggaran yang seefisien mungkin sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga kualitasnya dengan anggaran yang minimal.
2. Pos anggaran yang tidak terpakai akan menjadi SILPA dan bisa digunakan kembali untuk kebutuhan belanja tahun berikutnya.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.122.780.581.191,00 dengan realisasi sebesar Rp.116.663.023.257,00 sehingga terdapat sisa



anggaran sebesar Rp.6.117.557.934,00. Ikhtisar Realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Belanja RSUD Wonosari Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
BELANJA DAERAH	122.780.581.191,00	116.663.023.257,00	(6.117.557.934,00)
Belanja Operasi	98.287.864.191,00	93.181.288.473,00	(5.106.575.718,00)
Belanja Pegawai	4.591.600.000,00	4.112.150.000,00	(479.650.000,00)
Belanja Barang dan Jasa	93.696.064.191,00	89.069.138.473,00	(4.626.925.718,00)
Belanja Modal	24.492.717.000,00	23.481.734.784,00	(1.010.982.216,00)
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	23.278.892.000,00	22.303.481.384,00	(975.200.616,00)
Gedung dan Bangunan	1.204.025.000,00	1.168.279.400,00	(35.745.600,00)
Aset Lainnya	10.000.000,00	9.994.000,00	(6.000,00)
JUMLAH	122.780.581.191,00	116.663.023.257,00	(6.117.557.934,00)

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Wonosari Tahun 2022

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Muti Pelayanan Kesehatan Menengah	100%	100%	100	118.822.317.000	117.808.504.599	94,86
		3,03%	3,03%	100	3.858.264.191	3.854.518.658	99,903
Jumlah Belanja Total					122.780.581.191	116.663.023.257	95,017

Sumber data Laporan Keuangan RSUD Wonosari Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi RSUD Wonosari, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2022, namun juga melihat *trend* pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja RSUD Wonosari pada tahun 2022 adalah sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator Kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan RSUD Wonosari untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun Indikator Kinerja telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUD Wonosari. Sebagai organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sangat dimungkinkan untuk tidak bisa memuaskan semua pihak terutama dalam hal pelayanan. Untuk mengatasi hal ini berbagai upaya telah dilakukan RSUD Wonosari dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.



Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2022 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih, transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam tuitungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja RSUD Wonosari merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Bisnis RSUD Wonosari Tahun 2021 - 2026.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holder* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Direktur RSUD Wonosari.

Wonosari, 3 Maret 2023

DIREKTUR RSUD WONOSARI,



Dr. Heru Sulistyowati, Sp.A